



1132/D5.4/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PERALATAN PRAKTIK KERJASAMA INDONESIA-PERANCIS



2019

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting), 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 1132/D5.4/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA PRANCIS

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang

tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0300/D5.1/KU/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA PRANCIS TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1132/D5.40/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA
PRANCIS TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah merencanakan penyediaan tenaga listrik sebesar 35 Giga watt dalam 5 tahun, 2016 s.d. 2019, yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015. Usaha mendukung pengembangan proyek pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan tersebut dan untuk memetakan tantangan transisi energi, di antaranya dapat dilakukan dengan mengembangkan pelatihan teknisi bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi terbarukan. Selaras dengan hal tersebut, telah dilakukan Perjanjian Kemitraan 4 pihak antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Perancis, Schneider Foundation dan PT. Schneider Electric Indonesia berupa Perjanjian Kemitraan Pendirian Center of Excellence (CoE) Pelatihan Guru dan Pengajar serta Pembangunan (sampai dengan) 184 laboratorium SMK untuk Pelatihan Siswa Indonesia dalam bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi terbarukan dengan nomor 2017-00000006478 yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2017.

Perjanjian kemitraan dalam bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi terbarukan ini bertujuan di antaranya untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan guru dan siswa;
2. Membangun kemitraan dengan Industri terutama dalam pemagangan siswa SMK;

3. Mengembangkan 184 ruang laboratorium SMK (ruang praktik siswa SMK), dengan pembangunan minimal 124 ruang, selama 6 tahun (hingga tahun 2022);
4. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru produktif;
5. Membuka akses berkelanjutan menuju pasar kerja bagi siswa Indonesia;
6. Menampilkan strategi pengajaran baru untuk mengembangkan hubungan yang berkelanjutan antara industri dan pendidikan

Menindaklanjuti Kerja Sama ini, Direktorat Pembinaan SMK telah mengalokasikan dana penyediaan peralatan praktik untuk mendukung upaya pengembangan Laboratorium CoE SMK selama 6 tahun (hingga tahun 2022).

Berkaitan dengan implementasi penyediaan peralatan praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis ini, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan sebagai acuan kerja para pihak yang terlibat. Diharapkan, setelah petunjuk pelaksanaan ini diketahui oleh pemerintah daerah provinsi dan dinas pendidikan provinsi, dapat diperoleh dukungan, perhatian dan Kerja Sama yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Tujuan

Bantuan Peralatan Praktik ini merupakan upaya dalam melengkapi laboratorium CoE SMK yang akan dikembangkan dalam rangka:

1. Meningkatkan kompetensi guru dan teknisi/instruktur pasca pelatihan di CoE; dan
2. Meningkatkan kompetensi peserta didik SMK bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi terbarukan agar mencapai kompetensi yang dipersyaratkan industri.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Penyediaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis berasal dari bantuan pemerintah yang terdapat pada anggaran Direktorat Pembinaan SMK.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per paket, dengan total bantuan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk 120 paket.

E. Hasil Yang Diharapkan

Tersedianya 120 paket peralatan praktik untuk SMK Kerja Sama Indonesia Prancis.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis dikirimkan dalam bentuk alat.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Pelaksanaan penyediaan alat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pengadaan alat dimaksudkan untuk mendukung Perjanjian Kemitraan 4 pihak antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Perancis, *Schneider Foundation* dan PT. Schneider Electric Indonesia;
3. Pengadaan alat dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
4. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019;
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Direktorat Pembinaan SMK;
4. Dinas Pendidikan Provinsi;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
6. Penyedia Alat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Biro Umum
Kelompok Kerja melaksanakan Pemilihan Penyedia Peralatan Praktik Kerja Sama Indonesia – Prancis (alat laboratorium *Center of Excellence*) setelah mendapat surat tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Dikdasmen.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Menetapkan SMK penerima alat yang memenuhi persyaratan dengan menerbitkan surat keputusan.
3. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis;
 - b. Mengajukan permohonan pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan Ditjen Dikdasmen dengan melampirkan spesifikasi alat, total HPS, dan rancangan kontrak;
 - c. Menandatangani kontrak dengan penyedia alat;
 - d. Melaksanakan ketentuan pada kontrak dan lampirannya;

- e. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - f. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek); dan
 - h. Melaksanakan verifikasi dan supervisi (apabila diperlukan).
4. Dinas Pendidikan Provinsi
- a. Mengetahui Berita Serah Terima Alat dari Direktorat Pembinaan SMK kepada SMK penerima;
 - b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan pencatatan serah terima aset Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis bagi SMK Negeri;
 - c. Mengetahui serah terima aset Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis bagi SMK Swasta.
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Cabang Daerah/Balai Wilayah untuk penandatanganan surat tugas dan berita acara serah terima aset yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK sebelum kegiatan bimbingan teknis.
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis berkewajiban:
- a. Membentuk Tim Penerima Alat;
 - b. Melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi Takola SMK;
 - c. Mengunggah dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK ke dalam aplikasi Takola SMK;
 - d. Menghadiri bimbingan teknis dengan membawa dokumen persyaratan penerima bantuan dan mengikuti kegiatan dengan khidmat serta berpartisipasi aktif di dalam diskusi;
 - e. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan ketersediaan ruang dan infrastruktur pendukung untuk menempatkan peralatan, berkemampuan untuk memelihara dan memaksimalkan penggunaan alat;
 - f. Melakukan *entry* data berkaitan dengan penerimaan bantuan alat ini pada aplikasi Takola SMK;

- g. Melakukan Serah Terima Aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi (bagi SMK Negeri) atau Ketua Yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan perundangan.

6. Penyedia Alat

Penyedia yang terpilih berkewajiban untuk penyediaan, pengiriman, instalasi, dan *testing commissioning* alat;

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan SMK Penerima Bantuan Pemerintah

1. Sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
2. Memiliki ruang dan infrastruktur pendukung untuk menempatkan peralatan, serta strategi pemeliharaan dan memaksimalkan kegunaan alat;
3. Membuat tata letak (*lay-out*) penempatan peralatan;
4. Memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi SMK Swasta;
5. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah;
6. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
7. Memiliki surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6.000) untuk:
 - a) Melakukan pencatatan serah terima aset Peralatan Praktik SMK, bagi SMK Negeri.
 - b) Mengetahui serah terima aset Peralatan Praktik SMK, bagi SMK Swasta.

B. Mekanisme Penetapan SMK Penerima

Penetapan penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan data aplikasi Takola SMK;
2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pemerintah Peralatan Praktik SMK;
3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis bagi SMK calon penerima bantuan kepada Dinas pendidikan Provinsi;
4. SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan SMK penerima alat yang telah memenuhi persyaratan.

C. Bimbingan Teknis

Calon penerima bantuan peralatan Praktik SMK akan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Penjelasan:
 - a. Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK berkaitan dengan kerja sama pendidikan kejuruan Indonesia – Prancis (Laboratorium CoE);
 - b. Spesifikasi alat bidang kelistrikan, otomasi industri, dan energi terbarukan identifikasi kebutuhan peralatan di sekolah, termasuk prasarana dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, serta upaya memelihara dan memaksimalkan penggunaan alat;
 - c. Strategi pengiriman dan penerimaan alat;
 - d. Serah terima aset dari SMK penerima kepada provinsi.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Penerimaan Alat bagi SMK penerima yang sudah memenuhi syarat antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala Sekolah;
4. Rencana pengiriman dan penerimaan peralatan di sekolah dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
5. Rencana pemeliharaan alat dan memaksimalkan penggunaannya di sekolah;
6. Rencana menyiapkan ruang & infrastruktur yang dibutuhkan serta layouting.

E. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi/ Direktorat Pembinaan SMK melakukan supervisi secara sampling terhadap proses penerimaan alat di SMK bila diperlukan.

BAB V

BERITA ACARA SERAH SERAH TERIMA ASET

Alat yang telah diterima di sekolah harus diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi untuk dijadikan aset pendidikan daerah. Hal ini dimaksudkan pula agar dinas pendidikan provinsi dapat berperan aktif dalam memelihara aset pendidikan yang ada di sekolah dimaksud. Dengan demikian, Berita Acara Serah Terima Aset yang telah ditandatangani SMK penerima dan dinas pendidikan provinsi harus segera dikirim kembali ke Direktorat Pembinaan SMK sebagai salah satu bukti penerimaan bantuan pemerintah ini ke SMK.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam melaksanakan Program Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis.

Program Bantuan ini akan berjalan lancar, apabila pihak-pihak yang terlibat dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan, termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN 2

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>Logo Sekolah</p></div>	<p>[Kop Surat Sekolah]</p>
---	-----------------------------------

KEPUTUSAN KEPALA SMK
Nomor :

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN
PANITIA/TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PENGADAAN
PERALATAN PRAKTIK KETERAMPILAN SMK
SMK.....**

Menimbang : 1. bahwa salah satu program bantuan Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019 adalah pengadaan Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis;
2. bahwa dalam pelaksanaan program tersebut perlu dibentuk Tim Penerima Alat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan dan menugaskan nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan proses Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis, SMK.....;
- KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis , SMK mempunyai tugas:
1. Menerima alat setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat.
- KETIGA : Tim Penerima Alat bertanggung jawab kepada Kepala SMK.
- KEEMPAT : Biaya akibat pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada SMK.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri dengan catatan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala SMK

.

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK
Nomor :
Tanggal :

Tim Penerima
Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis
SMK

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Program Studi	Ketua Tim
2.	Guru produktif	Sekretaris
3.	Guru produktif	Anggota

Ditetapkan di :
Tanggal :

Kepala SMK

.....
NIP.

<div>Logo Sekolah</div>	<div>[Kop Surat Sekolah]</div>
-------------------------	--------------------------------

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMK.....
Alamat :
Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
tersedia ruang praktik termasuk infrastruktur pendukung (jaringan listrik, mekanikal dan elektrik) untuk menempatkan peralatan yang akan diadakan dari dana APBN tahun 2019 di SMK.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2019.
Kepala SMK.....

Meterai 6000

.....
NIP

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA-PRANCIS TAHUN 2019	NOMOR :..... TANGGAL :

Pada hari ini tanggalbulantahun Dua ribu sembilan belas bertempat di SMK di Jl., telah dilakukan pemeriksaan dan penerima barang:

A. Nama Tim Penerima Alat

1.
2.
3.

Selaku Tim Penerima Alat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK, Nomor: tanggal2019 , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

B. Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan : PT./CV

Alamat : Jl.

.....

Selaku Penyedia Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis, SMK....., berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :tanggal2019 antara PPK Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Penyedia. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan di atas **PIHAK PERTAMA** telah melakukan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA (terlampir);**
2. Kesimpulan pemeriksaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian.
3. **PIHAK PERTAMA** telah melakukan Penerimaan berdasarkan Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan Praktik SMK ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PT. /CV.....

Nama.....
(Jabatan)

PIHAK PERTAMA

1. Nama.....
TTD.....
2. Nama.....
TTD.....
3. Nama.....
TTD.....

LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN PERALATAN PRAKTIK KETERAMPILAN SMK

Nama Perusahaan : PT./CV
Tanggal :
Tempat : Jl.

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	SPESIFIKASI	SESUAI	TIDAK SESUAI

Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi dan uji fungsi Peralatan Praktik SMK

PIHAK KEDUA

PT. /CV.....

Nama.....
(Jabatan)

PIHAK PERTAMA

1. Nama..... TTD.....
2. Nama..... TTD.....
3. Nama..... TTD.....

<div>Logo Sekolah</div>	<div>[Kop Surat Sekolah]</div>
-------------------------	--------------------------------

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA-PRANCIS
SMK.....

Nomor :

Pada hari initanggal (.....) bulan tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Penerima Alat
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Nomor : tanggal tentang pembentukan Tim Penerima Alat Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
Jabatan : Kepala SMK
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Praktik Siswa, yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor: Tanggal, dan **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan **PIHAK KESATU**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis ini dibuat dengan sebenarnya dalam 3 (tiga) rangkap.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

 <p>Logo Sekolah</p>	<p>[Kop Surat Sekolah]</p>
---	-----------------------------------

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA-PRANCIS
SMK.....
TAHUN 2019

Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun dua
ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMK Negeri
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

Berita Acara Serah Terima Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis
dari Ketua Tim Penerima Alat kepada Kepala SMK Nomor:
..... tanggal

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis dari SMK Negeri..... dengan uraian sebagai berikut:

- 1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset Pengadaan Peralatan Praktik seperti dalam lampiran berita acara ini.
- 2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan mencatatkan dalam buku inventaris aset Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset
Pengadaan Peralatan Praktik Keterampilan SMK
Nomor :
Tanggal :
SMK Negeri :

No	Nama/ Jenis Alat	Jumlah Alat	Spesifikasi	Merk, Model, Type	Tahun Pembuatan	Harga beli/ Perolehan (Rp)	Sumber Pengadaan

PIHAK KEDUA,

(.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA,

(.....)
NIP.

<div>Logo Sekolah</div>	<div>[Kop Surat Sekolah]</div>
-------------------------	--------------------------------

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA-PRANCIS
SMK.....
TAHUN 2019

Nomor :

Pada hari ini..... Tanggal..... bulan..... tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :

Jabatan : Kepala SMK Swasta.....

Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
NIP :

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Peralatan dari Ketua Tim Penerima Alat kepada Kepala SMK Nomor: tanggal

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset Pengadaan Peralatan Praktik SMK..... dengan uraian sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset Pengadaan Peralatan Praktik seperti dalam lampiran berita acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan mencatatkan dalam buku inventaris aset Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset Pengadaan Sarana Peralatan Praktik SMK ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

Mengetahui :

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.....

(.....)

NIP

Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset

Pengadaan Sarana Peralatan Praktik Keterampilan SMK

Nomor :

Tanggal :

SMK Swasta :

No	Nama/ Jenis Alat	Jumlah Alat	Spesifikasi	Merk, Model, Type	Tahun Pembuatan	Harga beli/ Perolehan (Rp)	Sumber Pengadaan

PIHAK KEDUA,

(.....)

NIP.

PIHAK PERTAMA

(.....)

NIP.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.....

(.....)
NIP